

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Pemerintahan daerah dan DPRD sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa di daerah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah.

Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi umum yaitu (1) fungsi legislasi (fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran. Permasalahannya adalah apakah fungsi pengawasan lebih disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran ataukah lebih disebabkan karena permasalahan lain. Disamping itu, apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh

terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan (Sopanah dan Mardiasmo, 2003).

Sehubungan dengan hal itu maka peran dewan menjadi sangat meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintahan. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pengawasan anggaran dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Pramono, 2002 dalam Rosseptalia, 2006). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan kebijakan publik.

Penelitian yang pernah dilakukan Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Rosseptalia (2006). Hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan

keuangan daerah (APBD), seangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan public tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian ini replikasi dari penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003). Komitmen pemerintahan yang baru, untuk mengelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan public serta ketidaksignifikan transparansi kebijakan public terhadap pengawasan keuangan daerah yang merupakan tuntutan agenda reformasi, menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji kembali.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah terletak pada unit analisis dan sampel, dimana peneliti terdahulu menggunakan 2 sampel yaitu sampel dewan dan sampel masyarakat sebagai responden, dalam penelitian ini akan menggunakan 1 sampel yaitu sampel dewan. Dan unit analisis yang digunakan penelitian terdahulu komisi A, komisi B, dan komisi C. pada penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah seluruh anggota dewan komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, badan anggaran, badan musyawarah, dan badan legislasi daerah.

Dari uraian diatas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Study Empiris di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Apakah transparansi kebijakan publik, berpengaruh pada hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

C. Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memandang perlu untuk member pembatasan masalah dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup penelitian sehingga dapat dicapai sasaran yang diharapkan. Maka penulis membatasi masalah variabel independen pengetahuan dewan tentang anggaran, variabel dependen pengawasan keuangan daerah, variabel moderating partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada para akademisi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama dalam pengembangan sistem manajemen di sektor publik, dan dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan kinerja DPRD yang berkaitan dengan pengawasan anggaran (APBD) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, antaranya : desain penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, instrument penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta alat analisis.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian dan alat analisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil yang didapat penelitian berupa keseluruhan atau sebagian, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan harapan umum maupun peneliti. Dalam bab ini juga

dipaparkan alasan kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan.